

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 perihal kegiatan pengawasan secara internal pemerintah menjadi fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan pengawasan tersebut dapat mengetahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan secara internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat mendorong terwujudnya good governance. Salah satunya melalui audit pemerintah. Terciptanya good governance didukung oleh tiga aspek utama, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Jimmy 2015). Kegiatan pengawasan menjadi tanggung jawab pihak di luar eksekutif untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia menuntut pelaksanaan akuntabilitas di sektor publik. Hal ini dapat mewujudkan good governance makin meningkat. Krisis tersebut disebabkan oleh buruknya birokrasi maupun pengelolaan akibat banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir banyak kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang terjadi di Indonesia yang menjadi sorotan masyarakat. Banyak pejabat yang terlibat dalam kasus KKN, contohnya dalam kasus pungutan liar, kasus suap jaksa pinangki, sampai menggunakan uang negara). Metode pengawasan pemerintah yang sangat ketat diperlukan dalam memberantas kasus KKN di Indonesia. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengelola keuangan negara supaya para pejabat pemerintah tidak mempunyai kesempatan untuk menyelewengkan uang negara.

Auditor internal pemerintah memegang peran yang penting dalam proses terciptanya suatu hasil laporan keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Pasal 4 Tahun 2007 memuat peran dan fungsi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Peran auditor internal pemerintah adalah membantu Kepala Daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum. Diperlukan pengawasan yang andal dalam mempertanggungjawabkan besarnya dana pengelolaan suatu negara oleh pemerintah. Kegiatan pengawasan yang dapat dipercaya mampu menjamin terwujudnya pendistribusian dana yang merata sehingga penggunaan dana yang efektif dan efisien dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan audit sektor publik yang berkualitas.

Auditor memiliki peran penting dalam pengendalian serta pengawasan keuangan. Tugas dari seorang auditor adalah memberikan informasi yang terpercaya untuk mengambil suatu keputusan. Auditor juga memiliki tanggungjawab mencari keterangan tentang apa yang telah dilaksanakan dalam suatu entitas. Dalam tugas tersebut berfungsi untuk mengetahui apakah telah disetujui atau ditolak dengan cara memberikan rekomendasi tentang tindakan perbaikan. Seorang auditor agar dapat menemukan dan melaporkan adanya temuan pelanggaran dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh prinsipal sangat ditentukan oleh kualitas audit (Nirmala, A. P., & Cahyonowati 2013).

Menurut (Yosep 2016) menjelaskan bahwa audit internal berperan dalam memberikan penilaian yang independen mengenai kecukupan kebijakan dan prosedur kepatuhan. Dalam pemerintah, auditor internal sangat berpengaruh terhadap proses dalam menciptakan

akuntabilitas dan transparansi untuk mengelola laporan keuangan daerah dengan adanya transparansi laporan keuangan sehingga alokasi dana yang dibutuhkan dapat diketahui.

Kualitas hasil audit dapat ditinjau dari hasil informasi yang terdapat pada laporan yang telah dipublikasikan oleh stakeholder. Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengauditan oleh auditor internal pada inspektorat, yaitu mengulas suatu organisasi atau instansi dari akuntansinya, keuangannya, operasionalnya, dan informasi yang telah dikelola oleh pemerintah.

Kualitas hasil audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah akuntabilitas. Menurut (Hafizh 2017), akuntabilitas merupakan dorongan psikis seseorang untuk bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang dibuat dan tindakan yang telah dilakukan. Pemerintah memiliki peran sebagai pemberi informasi sehingga hak publik untuk diberikan informasi dan didengar informasinya serta hak untuk tahu dapat terpenuhi. (Dayanara 2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit sehingga makin tinggi akuntabilitas seorang auditor, kualitas hasil audit yang dihasilkan menjadi makin baik.

Selain akuntabilitas, seorang auditor juga harus memiliki sikap independensi. Independensi merupakan salah satu sikap yang harus dijunjung tinggi. Melalui sikap tersebut, seorang auditor dapat terjaga dari segala sesuatu yang dapat memengaruhi kualitas hasil audit. Makin tinggi independensi yang dimiliki seseorang akan memengaruhi hasil pekerjaannya. Seorang auditor yang memiliki sikap independensi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain ketika menjalankan tugasnya. Hal tersebut berkaitan dengan hasil audit yang telah dilakukan. Dengan demikian, makin tinggi independensi seorang auditor maka makin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Selain akuntabilitas dan independensi, kualitas hasil audit juga dipengaruhi oleh objektivitas. Objektivitas merupakan suatu keyakinan dan kualitas yang memberikan

nilai tinggi terhadap jasa seorang auditor. Melalui prinsip objektivitas yang menetapkan suatu kewajiban kepada auditor untuk tidak memihak atau condong pada satu sisi, bersikap jujur secara intelektual, serta terbebas dari konflik-konflik kepentingan. Makin tinggi tingkat objektivitas auditor, makin baik kinerjanya. Kualitas hasil audit menjadi perhatian penting. Hal ini disebabkan masih terdapat kesalahan hasil audit yang belum terdeteksi oleh aparat inspektorat yang berperan sebagai auditor internal, tetapi justru ditemukan oleh auditor eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peneliti memilih Inspektorat Kabupaten Klaten sebagai objek penelitian karena aparat inspektorat menjadi pengawas internal pemerintahan yang mempunyai peran yang sangat penting dalam organisasi atau instansi untuk memperkuat pengawasan internal sehingga dapat dihasilkan kinerja yang maksimal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit di Inspektorat Kabupaten Klaten.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud ingin tahu penyebab kasus yang terjadi pada Kabupaten Klaten yakni adanya penggunaan dana yang berlebihan sehingga menyebabkan adanya pembengkakan dana. Dengan menambahkan variabel independen yang belum diteliti pengaruhnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas audit pada auditor internal di Inspektorat Kabupaten Klaten.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui kombinasi variabel-variabel independen yang digunakan untuk menganalisis peningkatan kualitas audit oleh auditor internal pemerintah. Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten?

2. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana pengaruh Objektivitas terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan auditing, laporan keuangan, serta menambah wawasan mengenai pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit.
- b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bermanfaat menambah pengetahuan peneliti tentang bagaimana pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit.

b. Bagi Inspektorat Kabupaten Klaten

Bermanfaat dalam mengelola sumber daya manusia agar citra Inspektorat Kabupaten Klaten makin baik. Di samping itu, juga bermanfaat bagi Inspektorat Kabupaten Klaten sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan penugasan mengaudit laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti melakukan pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti melakukan pembahasan mengenai teori-teori yang memiliki hubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, pengukuran variabel penelitian, teknik pengambilan data, serta teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian.